

## **BAB 3**

### **GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI**

#### **3.1 Sejarah Kabupaten Bekasi**

Proses pembentukan Kabupaten Bekasi pada awalnya dimulai dari pembentukan Panitia Amanat Rakyat Bekasi setelah adanya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 oleh rakyat serta tokoh masyarakat Bekasi. Pada tanggal 17 Januari 1950 mereka menggelar rapat raksasa di alun-alun Bekasi yang dihadiri Mu'min sebagai Residen Militer Daerah V. Terdapat pernyataan sikap yang dihasilkan dari rapat raksasa tersebut yakni:

- a. Rakyat Bekasi tetap berdiri di belakang Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Rakyat Bekasi mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar Kabupaten Jatinegara diubah menjadi Kabupaten Bekasi.

Setelah adanya pembicaraan sebanyak tiga kali dari Februari sampai Juni 1950, akhirnya Kabupaten Bekasi disahkan dengan berlakunya Undang-Undang No 14 tahun 1950 yang tertanggal 15 Agustus 1950. Pada saat dibentuk, wilayah administratif Kabupaten Bekasi terdiri atas 4 kewedanaan, 13 kecamatan, serta 95 desa. Pada tahun 1960, pusat pemerintahan Kabupaten Bekasi dipindah dari Jatinegara ke Kecamatan Bekasi Timur. Kemudian pada tahun 1980, pusat pemerintahan dipindah lagi ke Kecamatan Bekasi Selatan. Dengan perkembangan Kecamatan Bekasi yang sangat pesat dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain serta kebutuhan pelayanan khusus bagi masyarakat, masyarakat Kecamatan Bekasi menuntut adanya perubahan kecamatan Bekasi menjadi Kota Administratif Bekasi.

Melalui adanya Peraturan Pemerintah No 48 tahun 1981, Kecamatan Bekasi, yang terdiri atas Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, mengalami peningkatan status dari kecamatan menjadi Kota Administratif Bekasi. Keempat kecamatan tersebut terdiri atas 18 kelurahan dan 8 desa. Peresmian Kota Administratif Bekasi dilakukan pada tanggal 20 April 1982 oleh Menteri Dalam Negeri dengan Walikota Bekasi. Penetapan kota administratif bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai sarana dan pembinaan wilayah dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Walaupun begitu, Kota Administratif Bekasi masih berada di bawah naungan Kabupaten Bekasi.

Kota Administratif Bekasi yang merupakan daerah penyangga DKI Jakarta bertugas untuk meringankan tekanan perkembangan penduduk DKI Jakarta dengan mengarahkan pola permukiman dan penyebaran kesempatan kerja secara lebih merata sesuai dengan Instruksi Presiden No 13 tahun 1976 tentang Pengembangan Wilayah Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi). Kondisi tersebut mengakibatkan Kota Administratif Bekasi semakin strategis dari segi politik, ekonomi, sosial, serta budaya.

Konsep Botabek yang didukung dengan adanya Instruksi Presiden No 13 tahun 1976 tentang Pengembangan Wilayah Jabotabek merupakan salah satu penyebab perkembangan Kecamatan Bekasi sampai menjadi kota administratif. Kedekatan wilayah Kecamatan Bekasi dengan DKI Jakarta yang merupakan ibukota negara, secara langsung merangsang pertumbuhan Kota Administratif Bekasi, baik dari sifat kekotaan serta kebutuhan akan sarana prasarana. Rembesan pembangunan dari DKI Jakarta mengakibatkan kebutuhan akan peningkatan serta pengembangan sarana dan prasarana sebagai kebutuhan pengelolaan wilayah. Selain itu, penggalan potensi daerah yang ada di Kota Administratif Bekasi semakin gencar dilakukan.

Perkembangan Kota Administratif Bekasi terus bergerak cepat dari tahun 1981 sampai tahun 1995. Jumlah penduduk yang terus meningkat, ketergalian sumber daya alam daerah, serta ketersediaan fasilitas umum yang lengkap semakin menunjukkan kesiapan Kota Administratif Bekasi menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II. Di sisi lain, pada tahun 1996 Kabupaten Bekasi dengan luas wilayah yang mencapai 148.437 Ha disertai dengan karakteristik wilayah yang beragam serta jumlah penduduk yang telah mencapai 1.503.798 jiwa sangat bekeinginan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dengan perkembangan tersebut, Undang-Undang No 9 tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi ditetapkan. Selama satu tahun, Kabupaten Bekasi serta Kotamadya Bekasi melakukan proses serta adaptasi pemekaran daerah, sampai akhirnya Kotamadya Bekasi ditingkatkan statusnya dan diresmikan pada tanggal 10 Maret 1997.

Kabupaten Bekasi yang pada awalnya terdiri atas 22 kecamatan, termasuk Kota Administratif Bekasi, dengan adanya pemekaran daerah kemudian berkurang menjadi 15 kecamatan. Pengurangan sebanyak tujuh kecamatan dikarenakan pengurangan Kota Administratif Bekasi yang terdiri atas empat kecamatan, yakni Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Bekasi Timur dan Bekasi Utara, serta tambahan kecamatan yakni Kecamatan Pondokgede, Jatiasih, Bantargebang, serta Wilayah Pembantu Kecamatan Jatisampurna.

Pemekaran daerah yang terjadi di Kabupaten Bekasi merupakan salah satu pemekaran daerah yang terjadi sebelum adanya Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Undang-undang ini merupakan awal dari fenomena pemekaran daerah yang terjadi di Indonesia.

### **3.2 Wilayah Administratif Kabupaten Bekasi**

Secara geografis, Kabupaten Bekasi terletak di bagian utara Propinsi Jawa Barat dan berdekatan dengan ibukota Indonesia, yakni DKI Jakarta. Kabupaten Bekasi berada pada dataran rendah dengan luas wilayah 127.388 Ha. Sekitar 72% wilayah Kabupaten Bekasi berada pada ketinggian 0-25 meter di atas permukaan air laut. Kabupaten Bekasi terletak pada  $6^{\circ}10'-6^{\circ}30'$  LS dan  $106^{\circ}48'78''-107^{\circ}27'29''$  BT.

Batas administratif Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor
- c. Sebelah Barat : Propinsi DKI Jakarta dan Kota Bekasi
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Karawang

Wilayah administratif Kabupaten Bekasi terus mengalami perubahan sejak tahun 1991 sampai tahun 2007. Pemekaran daerah, baik pemekaran kabupaten dan kota maupun pemekaran kecamatan terjadi selama periode tersebut. Setelah adanya pemekaran daerah tahun 1996, Kabupaten Bekasi mengalami pengurangan wilayah administratif seiring berpisahnya dengan Kota Administratif Bekasi. Pemekaran kabupaten berdampak pengurangan tujuh kecamatan, sehingga total kecamatan menjadi lima belas kecamatan.

Berikut adalah perubahan wilayah administratif Kabupaten Bekasi dari sebelum dan sesudah pemekaran daerah:

**TABEL III.1**  
**KECAMATAN DI KABUPATEN BEKASI 1992-2007**

<b>Tahun</b>	<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Jumlah Kecamatan</b>
1992-1996	Pondokgede, Jatiasih, Bantargebang, Setu, Cibarusah, Serang, Lemahabang, Cikarang, Kedungwaringin, Cibitung, Tambun, Tarumajaya, Babelan, Tambelang, Sukatani, Pebayuran, Cabangbungin, Muaragembong, Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, dan Bekasi Utara.	22
1997-2001	Setu, Cibarusah, Serang, Lemahabang, Cikarang, Kedungwaringin, Cibitung, Tambun, Tarumajaya, Babelan, Tambelang, Sukatani, Pebayuran, Cabangbungin, dan Muaragembong.	15
2001-sekarang	Setu, Serang Baru, Cikarang Pusat, Cikarang Selatan, Cibarusah, Bojongmangu, Cikarang Timur, Kedungwaringin, Cikarang Utara, Karang Bahagia, Cibitung, Cikarang Barat, Tambun Selatan, Tambun Utara, Babelan, Tarumajaya, Tambelang, Sukawangi, Sukatani, Sukakarya, Pebayuran, Cabangbungin, Muaragembong	23

*Sumber : Kabupaten Bekasi dalam Angka*

Pada tahun 2001, Kabupaten Bekasi melakukan pemekaran kecamatan karena perkembangan Kabupaten Bekasi yang pesat akibat perkembangan kependudukan (jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, serta kepadatan penduduk), perekonomian (PDRB, PAD, serta IPM), geografis wilayah, sosial, budaya, dan politik. Jumlah kecamatan sebanyak 23 yang terdiri atas 187 desa terus berjalan sejak tahun 2001 sampai saat ini. Setiap kecamatan memiliki desa dengan jumlah antara 6 – 13 desa. Kecamatan dengan jumlah desa tersedikit adalah Kecamatan Cikarang Pusat, Bojongmangu, dan Muaragembong, sedangkan kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Pebayuran. Dengan luas wilayah 127.388 Ha, kecamatan terluas di Kabupaten Bekasi adalah Kecamatan Muaragembong dengan luas 14.009 Ha atau 11% dari luas kabupaten.

### **3.3 Pembagian Aset**

Dengan adanya pemekaran daerah, aset yang pada awalnya dimiliki oleh Kabupaten Bekasi serta merta perlu dibagi dengan daerah otonom baru yakni Kota Bekasi. Apalagi Kota Bekasi sebelumnya adalah ibukota Kabupaten Bekasi, dan disana terdapat banyak aset pemerintah daerah. Pada tahun 1997 terdapat empat skema yang digunakan dalam pembagian aset. Berikut adalah keempat skema pembagian aset di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi (Bratha, 2010):

- a. Pemberian aset milik Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada Pemerintah Kota Bekasi dengan nilai kompensasi tertentu. Misalnya adalah pemberian gedung pemerintahan kepada Pemerintah Kota Bekasi yang diganti senilai Rp 10 milyar.
- b. Pemberian aset milik Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada Pemerintah Kota Bekasi secara cuma-cuma;
- c. Aset yang dikelola oleh pihak ketiga yang menjadi hak Pemerintah Kota Bekasi setelah masa kontraknya berakhir; dan
- d. Aset yang kepemilikannya tetap menjadi milik Pemerintah Kabupaten Bekasi, meskipun berada di luar wilayahnya.

Perpindahan ibukota Kabupaten Bekasi sejak tahun 1996 telah dipersiapkan dari Kecamatan Bekasi menuju Kecamatan Cikarang pusat di daerah Delta Mas. Lokasi Delta Mas dipilih karena adanya rangsangan dari pihak Delta Mas yakni pemberian luas lahan sebesar 40 Ha dari kira-kira 1.000 Ha untuk pembangunan kawasan pemerintahan Kabupaten Bekasi. Dalam proses pembangunan, baik Pemerintah Kabupaten Bekasi maupun Pemerintah Kota Bekasi sama-sama berada di Kota Bekasi, namun sudah terdapat perbedaan gedung, yakni Pemerintah Kabupaten Bekasi berada di Kecamatan Bekasi Barat, sedangkan Pemerintah Kota Bekasi berada di Kecamatan Bekasi Timur

Selain kawasan pemerintahan, terdapat aset berupa prasarana seperti lapangan GOR, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain pada akhirnya dihibahkan kepada Kota Bekasi dengan harga tertentu. Dalam perkembangannya, Kabupaten Bekasi kembali membangun sarana dan prasarana baru di wilayah Kabupaten Bekasi. Sedangkan untuk kantor BUMN, seperti PLN, Telkom, dan PDAM, yang skala pelayanannya awalnya mencakup Kabupaten – Kota Bekasi, kemudian membangun kantor baru di Kabupaten Bekasi setelah adanya pemekaran.

Proses pembagian aset antara Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi cukup baik dibandingkan dengan dengan proses pembagian aset pemekaran daerah setelah 1999. Dengan adanya Undang-Undang No 10 tahun 2001, disebutkan bahwa aset yang berada di wilayah pemekaran otomatis menjadi milik pemerintah hasil pemekaran tersebut. Kondisi ini berbeda dengan pembagian aset antara Kabupaten dan Kota Bekasi dimana terdapat negosiasi pembagian aset terlebih dahulu sampai tahun 1997.

### **3.4 Pembagian Aparatur Pemerintahan**

Dengan adanya pemekaran daerah di Kabupaten Bekasi, aparatur pemerintah Kabupaten Bekasi kemudian dibagi untuk dua pemerintah, yakni Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi. Berdasarkan wawancara dengan Pak Herman, Sekretaris Inspektorat Bawasda Kabupaten Bekasi yang pada periode pemekaran daerah menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, proses pembagian tersebut diatur oleh Badan Kepegawaian Daerah dengan mempertimbangkan preferensi maupun tempat tinggal aparat melalui kuesioner. Beliau juga menambahkan bahwa pada awalnya jauh lebih banyak aparatur yang lebih memilih untuk bekerja di Pemerintah Kota Bekasi dibandingkan di Pemerintah Kabupaten Bekasi. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, setelah

pemekaran daerah terjadi Pemerintah Kabupaten Bekasi melakukan tes CPNS secara besar-besaran.

Saat ini, sekalipun kuantitas aparatur pemerintah Kabupaten Bekasi telah terpenuhi, kenyataannya aparatur tersebut mayoritas banyak yang berasal dari Kota Bekasi. Pemkab Bekasi menyediakan bus karyawan dengan jurusan Bekasi Barat – Cikarang Pusat untuk antar jemput karyawan setiap hari kerja. Menurut Pak Herman, selain bertempat tinggal di Kota Bekasi, terdapat banyak aparatur yang bertempat tinggal di Jakarta dan hanya berada di Kabupaten Bekasi selama hari kerja.

### **3.5 Perekonomian Kabupaten Bekasi**

Kabupaten Bekasi merupakan penyangga propinsi DKI Jakarta yang merupakan ibukota Negara. Perkembangan DKI Jakarta secara langsung juga mempengaruhi perkembangan perekonomian Kabupaten Bekasi. Mobilitas penduduk serta tenaga kerja baik dari Kabupaten Bekasi menuju DKI Jakarta merupakan salah satu akibat posisi Kabupaten Bekasi sebagai wilayah penyangga propinsi DKI Jakarta. Kedua hal tersebut menyebabkan perkembangan industri manufaktur, jasa, pertanian, serta perumahan yang cukup pesat oleh investor.

Terdapat beberapa sektor perekonomian strategis yang dianggap penting bagi perkembangan wilayah Kabupaten Bekasi. Berdasarkan Tata Ruang Wilayah Jawa Barat, sektor unggulan atau sektor yang memiliki peran relatif besar serta memiliki kecenderungan untuk terus berkembang adalah industri pengolahan. Sedangkan sektor potensial (berkembang) atau sektor yang memiliki peran belum relatif besar namun cenderung berkembang adalah listrik, gas dan air, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan.

Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB memang relatif kecil dibandingkan dengan sektor primadona lain seperti industri pengolahan. Namun sektor pertanian masih merupakan sektor yang berperan penting dan strategis karena merupakan sektor perekonomian rakyat di perdesaan dalam memenuhi kebutuhan pangan dan penyediaan lapangan pekerjaan. Sama seperti di daerah lain di sebelah utara Pulau Jawa, sektor pertanian di Kabupaten Bekasi didominasi oleh sub sektor tanaman pangan seperti padi, tanaman palawija, sayuran, serta buah-buahan.

Sektor perkebunan merupakan sektor perekonomian primer yang belum memberikan sumbangan berarti terhadap perekonomian Kabupaten Bekasi. Luas wilayah yang sudah digunakan dalam mengembangkan sektor perekonomian perkebunan di Kabupaten Bekasi sebesar 4.420 Ha pada tahun 2003. Sejak tahun 2000, pengembangan sektor perkebunan dilakukan di lahan-lahan kosong, namun memang belum memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Kabupaten Bekasi. Komoditas yang pada umumnya dibudidayakan adalah kelapa, sengo, serta melinjo.

Selain pertanian dan perkebunan, Kabupaten Bekasi memiliki wilayah laut dengan daerah pesisir sepanjang bentangan pantai sepanjang 72 km, dengan wilayah perairan sejauh 12 mil dari pantai sebagai daerah tangkapan dan budidaya. Selain itu, Kabupaten Bekasi memiliki wilayah daratan yang cukup potensial bagi pengembangan budidaya air tawar. Produksi perikanan dari tahun ke tahun di Kabupaten Bekasi terus menunjukkan peningkatan, walaupun tidak sebegitu besar seperti sektor industri pengolahan.

Di Kabupaten Bekasi, berbagai komoditas peternakan seperti ternak besar sampai unggas telah ditenakkan dan dibudidayakan baik oleh masyarakat baik pihak swasta maupun penduduk kecil. Dengan ini, Kabupaten Bekasi menjadi daerah pemasok daging sapi ke Bogor, Tangerang, Jakarta, Cianjur, Denpasar, bahkan Medan.

Sektor industri merupakan motor penggerak di PDRB kabupaten Bekasi. Selain itu sektor industri turut menyediakan lapangan pekerjaan serta mendorong pertumbuhan sektor non-pertanian lainnya. Sebagai sektor sekunder, sektor industri dianggap sebagai sektor strategis di perekonomian Kabupaten Bekasi. Walaupun begitu, terdapat beberapa dampak yang kurang menguntungkan seperti kesenjangan social, peralihan fungsi lahan, lemahnya keterkaitan dengan usaha kecil dan menengah, serta adanya pencemaran lingkungan. Sektor industri pengolahan yang terdapat di Kabupaten Bekasi adalah industri tanpa migas, yang mencakup industri besar, sedang, kecil, dan industri kerajinan rumah tangga. Kawasan industri yang terdapat di Kabupaten Bekasi merupakan salah satu sentra industri terbesar di Jawa Barat, bahkan di Asia Tenggara. Industri unggulan yang terdapat di Kabupaten Bekasi adalah jenis elektronika, tekstil/pakaian jadi, komponen kendaraan, serta boneka yang kesemuanya berada di kawasan industri. Selain itu terdapat beberapa jenis industri lain yakni jenis kemasan berada di Kecamatan Setu, bordir di Kecamatan Tambun Selatan, serta tas kulit ular di Kecamatan Cabangbungin.

Tabel berikut menyajikan perkembangan PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Bekasi sejak tahun 1997-2007, berikut dengan sektor ekonomi masing-masing.

**TABEL III.2**  
**PERKEMBANGAN PDRB KABUPATEN BEKASI ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2000-2006 (JUTA RP)**

<b>LAPANGAN USAHA</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
<b>1. Pertanian</b>	<b>355.946,35</b>	<b>567.681,29</b>	<b>620.543,08</b>	<b>715.242,83</b>	<b>770.318,04</b>	<b>894.829,29</b>	<b>971.172,36</b>	<b>1.075.257,58</b>	<b>1.140.839</b>	<b>1.307.708,79</b>
1.1 Tanaman Pangan	228.569,47	408.387,21	444.657,18	491.614,89	526.132,43	605.749,59	685.352,07	726.461,78	611.566,76	853.497,27
1.2 Tanaman Perkebunan	6.241,48	7.565,70	7.565,70	13.160,67	14.175,08	15.144,70	12.852,70	13.739,19	14.389,07	13.390,30
1.3 Peternakan dan Hasil-hasilnya	95.470,99	127.213,43	127.213,43	164.939,24	179.247,65	217.307,84	308.562	327.384,53	280.511,12	363.619,67
1.4 Kehutanan	383,38	458,22	464,72	496,82	546,88	519,69	491,40	496,81	492,17	506,00
1.5 Perikanan	25.281,03	40.642,05	40.642,05	45.031,21	50.216,00	56.107,48	67.999,18	72.757,51	64.213,25	76.695,54
<b>2. Pertambangan dan Penggalian</b>	<b>18.934,21</b>	<b>8.627,62</b>	<b>8.843,98</b>	<b>9.132,71</b>	<b>286.567,60</b>	<b>397.116,21</b>	<b>408.448,53</b>	<b>600.068,53</b>	<b>773.177,70</b>	<b>1.184.350,14</b>
2.1 Minyak dan Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	279.682,10	385.471,21	589.283,39	762.784,97	399.784,30	1.1172.853,93
2.2 Pertambangan tanpa Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Penggalian	18.934,21	8.627,62	8.843,98	9.132,71	6.985,50	11.644,99	10.758,14	10.392,73	8.664,23	11.496,21
<b>3. Industri Pengolahan</b>	<b>8.654.798,81</b>	<b>12.982.198,21</b>	<b>21.253.185,08</b>	<b>25.075.682,93</b>	<b>27.295.731,60</b>	<b>29.927.735,55</b>	<b>33.001.319,07</b>	<b>36.377.183,63</b>	<b>43.023.584,16</b>	<b>53.066.161,20</b>
3.1 Industri Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Industri Tanpa Migas	8.654.798,81	12.982.198,21	21.253.185,08	25.075.682,93	27.295.731,60	29.927.735,55	33.001.319,07	36.377.183,63	43.023.584,16	53.066.161,20
<b>4. Listrik Gas dan Air Bersih</b>	<b>134.421,93</b>	<b>138.390,54</b>	<b>153.088,69</b>	<b>538.539,46</b>	<b>686.802,11</b>	<b>877.864,95</b>	<b>1.036.288,86</b>	<b>1.215.203,59</b>	<b>1.377.769,75</b>	<b>1.535.314,12</b>
4.1 Listrik	133.523,55	137.355,53	151.970,16	398.657,15	512.178,71	690.623,06	944.009,95	1.100.090,65	798.135,51	1.288.070,80
4.2 Gas Kota	0,00	0,00	0,00	135.975,00	169.470,80	180.842,30	261.373,19	266.367,64	229.880,70	231.449,78
4.3 Air Bersih	898,38	1.035,01	1.118,53	3.907,31	5.152,60	6.399,59	9.280,44	11.311,46	8.272,65	15.793,54
<b>5. Bangunan/ Konstruksi</b>	<b>258.541,60</b>	<b>287.278,38</b>	<b>303.768,16</b>	<b>308.784,30</b>	<b>343.800,44</b>	<b>384.489,23</b>	<b>432.742,63</b>	<b>504.931,00</b>	<b>598.770,60</b>	<b>785.818,28</b>
<b>6. Perdagangan Hotel dan Restoran</b>	<b>1.306.991,41</b>	<b>2.058.218,11</b>	<b>2.250.044,98</b>	<b>2.686.367,35</b>	<b>2.948.978,03</b>	<b>3.233.625,08</b>	<b>3.544.519,19</b>	<b>3.991.279,04</b>	<b>4.758.799,26</b>	<b>5.526.634,00</b>
6.1 Perdagangan Besar dan Eceran	1.086.431,92	1.728.644,48	1.886.909,39	2.420.299,89	2.669.449,63	2.942.985,69	3.659.283,57	4.364.788,28	3.239.932,09	5.085.409,46
6.2 Hotel	6.938,12	10.327,92	10.666,39	11.787,65	13.155,26	14.433,31	18.496,46	21.070,98	17.052,14	23.785,34
6.3 Restoran	213.621,37	319.245,71	352.469,20	254.279,81	266.373,15	276.206,09	313.499,01	372.940,00	287.534,96	417.439,20
<b>7. Pengangkutan dan Komunikasi</b>	<b>178.112,36</b>	<b>221.803,98</b>	<b>241.087,02</b>	<b>361.071,15</b>	<b>431.029,14</b>	<b>494.796,58</b>	<b>569.494,55</b>	<b>648.897,98</b>	<b>782.244,16</b>	<b>1.005.029,54</b>
7.1 Pengangkutan	150.755,51	188.009,85	203.525,79	230.434,00	275.412,10	308.212,78	408.420,72	508.100,09	355.965,81	741.666,81
7.1.1 Angkutan Rel	565,07	773,37	869,48	531,95	540,25	688,77	921,13	1.018,12	820,36	1.110,97
7.1.2 Angkutan Jalan Raya	127.652,11	159.120,67	173.274,15	191.176,38	231.461,79	259.894,75	341.495,47	431.030,09	295.059,51	637.355,83
7.1.3 Angkutan Laut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.4 Angkutan Sungai dan Penyebrangan	0,00	0,00	0,00	704,93	714,38	690,64	648,30	677,00	671,55	455,29
7.1.5 Angkutan Udara		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.6 Jasa Penunjang Angkutan	22.538,33	28.115,81	29.382,16	38.020,74	42.695,69	46.938,62	63.355,83	75.374,88	59.414,39	102.744,71
7.2 Komunikasi	27.356,85	33.794,13	37.561,23	130.637,16	155.617,04	186.583,80	240.477,25	274.144,07	213.528,74	263.362,73
<b>8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan</b>	<b>340.870,99</b>	<b>257.855,37</b>	<b>273.425,89</b>	<b>238.560,67</b>	<b>316.300,17</b>	<b>345.905,48</b>	<b>369.928,63</b>	<b>398.105,69</b>	<b>453.708,86</b>	<b>732.697,43</b>
8.1 Bank	190.720,00	45.379,00	44.226,00	39.982,00	49.981,10	52.842,33	63.347,33	73.746,12	57.952,00	236.732,89
8.2 Lembaga Keuangan Lainnya	15.541,51	28.490,27	30.658,02	31.376,12	38.460,83	48.599,02	57.991,42	65.657,88	52.322,44	88.065,82
8.3 Sewa Bangunan	120.187,38	166.733,06	180.407,21	181.703,13	193.640,56	204.421,63	230.221,61	260.376,04	216.604,50	334.985,00
8.4 Jasa Perusahaan	14.422,10	17.253,04	18.134,66	30.499,42	35.217,68	40.042,50	46.545,33	53.928,82	43.049,69	72.913,72

LAPANGAN USAHA		1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
<b>9</b>	<b>Jasa-Jasa</b>	<b>303.718,12</b>	<b>436.147,59</b>	<b>464.768,88</b>	<b>549.746,09</b>	<b>640.280,08</b>	<b>699.072,34</b>	<b>776.473,07</b>	<b>879.469,16</b>	<b>1.014.539,90</b>	<b>1.375.816,06</b>
	9.1 Pemerintahan Umum	157.331,24	203.055,48	216.680,51	285.901,13	350.480,93	383.083,43	509.156,43	604.769,91	435.679,43	902.841,73
	9.2 Swasta	146.386,88	233.092,11	248.088,37	263.844,96	289.799,15	315.988,91	370.312,73	409.769,99	340.793,63	472.974,33
	9.2.1 Sosial	47.038,10	65.632,76	69.959,90	76.567,73	79.808,84	83.812,85	97.349,56	109.576,66	90.222,02	142.618,29
	Kemasyarakatan										
	9.2.2 Hiburan dan Rekreasi	3.640,00	5.566,49	6.004,23	6.788,42	7.632,10	8.401,45	10.491,73	11.868,45	9.351,65	16.686,22
	9.2.3 Perorangan dan Rumah Tangga	95.708,78	161.892,86	172.124,24	180.488,81	202.358,21	223.774,61	262.471,44	288.324,88	241.219,96	313.669,82
<b>PDRB BRUTO</b>		<b>11.552.335,78</b>	<b>16.958.201,09</b>	<b>25.568.755,76</b>	<b>30.528.127,49</b>	<b>33.719.807,22</b>	<b>37.255.434,71</b>	<b>41.110.386,88</b>	<b>45.690.396,20</b>	<b>53.923.434,19</b>	<b>66.519.529,55</b>

Sumber: Kabupaten Bekasi dalam Angka